

**PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL DALAM MENENTUKAN PILIHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA PANTON PAWOH
KECAMATAN LABUHAN HAJI BARAT
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

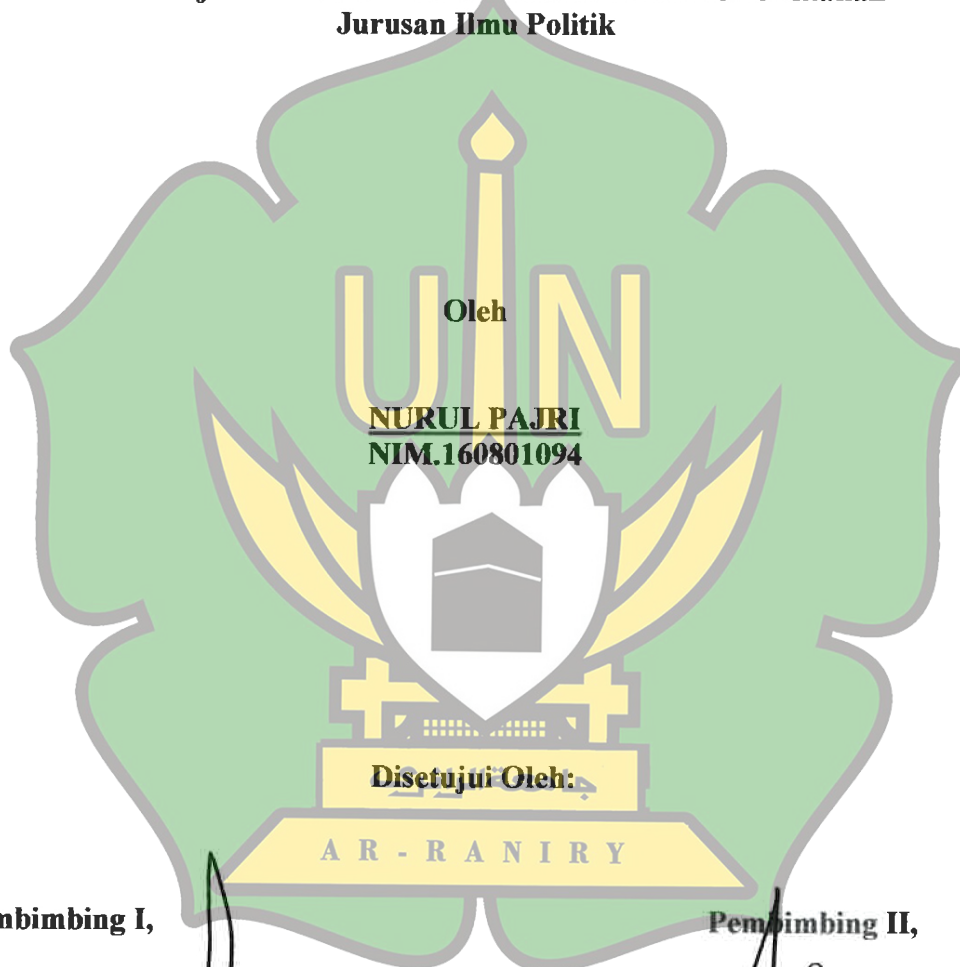
NURUL PAJRI
NIM. 160801094

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelara Sarjana S-1 dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Politik**



Pembimbing I,

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004

Pembimbing II,

Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

**PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL DALAM MENENTUKAN PILIHAN PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA PANTON PAWOH KECAMATAN
LABUHAN HAJI BARAT KABUPATEN
ACEH SELATAN 2022**

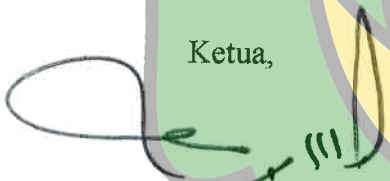
SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal : Senin, 17 April 2023 M
26 Ramadhan 1444 H

Darussalam Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
NIP. 197309212000032004


Sekretaris,


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
NIP. 198605132019031006

Penguji 1,


Muhammad Thalal, LC., M.Si., M.Ed
NIP. 197810162008011011

Penguji II,


Dani Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Si.
NIDN. 2008048903

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,




Dr. Muji Manda, S.Ag., M.Ag
NIP. 197403271999031005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Pajri
NIM : 160801094
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi : Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 April 2020
Yang menandatangani



Nurul Pajri

ABSTRAK

Nama : Nurul Pajri
Fakultas / Prodi : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan/Illmu Politik
Judul : Partisipasi Pemilih Milenial dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022
Tanggal Sidang : 17 April 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A
Kata Kunci : Partisipasi, Pemilih Milenial, Menentukan Pilihan, Kepala Desa

Meningkatkan partisipasi politik pada pemilih milenial di desa Panton Pawoh merupakan tugas aparatur desa selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan kepala desa. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui partisipasi pemilih Milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih Milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022. Penelitian ini bersifat kualitatif. Subjek penelitian ini Milenial di desa Panton Pawoh. Teknik pengumpulan data yang meliputi; wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian diperoleh bahwa Partisipasi pemilih milenial dalam pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh dimana Partisipasi pemilih milenial dalam memilih kepala desa ingin adanya suatu perubahan, selain itu pemilih milenial dalam memilih kepala desa karena dirinya sangat kritis dalam menentukan pilihan agar kedepannya desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Tengah Kabupaten Aceh Selatan bisa lebih maju lagi, kemudian partisipasi pemilih milenial dalam memilih kandidat kepala desa memiliki irama karena mereka lebih suka mengkomunikasikan kandidat yang dia sukai kepada pemilih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh adalah faktor kebijakan yang disampaikan oleh kepala desa ketika melakukan kampanye, kedua faktor citra diri, ketiga adalah faktor emosional dan yang keempat adalah faktor media sosial, dimana media sosial saat ini perkembangannya sangat pesat dan sangat disukai oleh milenial.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kekuatan, kesabaran, kejernihan pikiran, dan keistiqamahan sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu kewajiban akademik. Dan karena kuasa-Nya pula penulis diberikan kecukupan rizki guna memenuhi segala kebutuhan terkait penyelesaian skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang perkataannya adalah pedoman, perbuatannya adalah teladan, dan sepanjang hayatnya berjuang untuk kejayaan Islam dan keselamatan kaum muslimin.

Syukur Alhamdulillah berkat karunia Allah SWT penulis telah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Partisipasi Pemilih Milenial dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022". Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Sepanjang menyiapkan skripsi ini, berbagai kendala dan hambatan mewarnai penyelesaian skripsi ini.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis istimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta, Ibunda tersayang dan kakak serta adik kandung, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril maupun materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan dan beserta teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu Politik yang tidakbisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, nasihat-nasihat dan semangatnya yang membuat penulis tetap semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A sebagai pembimbing I dan Bapak Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Kemudian ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag selaku dekan Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan dan juga kepada Bapak Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku ketua Prodi ilmu politik beserta seluruh stafnya, dan kepada ibu Aklima, S.Fil., MA selaku penasehat akademik (PA) serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Pemerintahan yang tidak dituliskan satu persatu yang telah berbagi ilmu kepada penulis selama dibangku perkuliahan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Panton Pawoh dan Milenial yang telah memberikan data kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kepala perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan, Kepala perpustakaan pasca sarjana UIN Ar-Raniry serta seluruh karyawan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kebaikan dimasa mendatang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca. Akhir kalam, hanya kepada Allah SWT kita memohon, semoga jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak dibalas oleh-Nya. Aamiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh Penulis

7 April 2020

Nurul Pajri

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Penjelasan Istilah.....	6
1.6 Kajian Pustaka.....	8
1.7 Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : TINJAUAN UMUM PEMILIH MILENIAL DALAM PILIHAN KEPALA DESA	
2.1 Konsep Partisipasi.....	12
2.1.1 Pengertian Tindak Partisipasi.....	12
2.1.2 Bentuk Partisipasi.....	16
2.2 Konsep Politik.....	17
2.1.1 Pengertian Tindak Politik.....	17
2.1.2 Strategi Politik.....	21
2.3 Partisipasi Politik.....	27
2.4 Partisipasi Pemilih Milenial.....	29
2.4.1 Karakteristik Politik Pemilih Milenial.....	34
2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilih.....	36
2.4.3 Partisipasi Politik pemilih Milenial.....	38
2.5 Kepala Desa.....	40
2.5.1 Pengertian Kepala Desa.....	40
2.5.2 Tugas dan Kewajiban Kepala Desa.....	42
2.5.3 Wewenang Kepala Desa.....	44
2.5.4 Gaya Kepemimpinan Kepala Desa.....	46
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.3 Subjek Penelitian.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5 Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV: ANALISIS PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.2 Hasil Penelitian.....	52

4.2.1 Partisipasi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Lebuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022.....	59
4.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan 2022 Barat.....	6
4.3 Pembahasan	71
4.3.1 Partisipasi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022.....	71
4.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.....	73
BAB V : PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	52
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

- Lampiran I: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.
Lampiran 2: Surat Permohonan Kesiediaan Memberi Data.
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum di daerah yang merupakan kegiatan politik lokal, fakta di lapangan menunjukkan proses demokrasi lokal yang seharusnya baik-baik saja sejalan dengan tujuan meningkatkan partisipasi politik para pemimpin dalam pemilu, belum mencapai hasil yang maksimal. Para elit politik lokal menjadikan pemilih terpolarisasi dalam menentukan pilihannya. Polarisasi pemilih menunjukkan belum dewasa nya pemilih dalam proses pemilihan. Mobilisasi massa dan rekayasa sosial menjadikan perilaku politik masyarakat tidak berkualitas dan cenderung menjadi irasional. Kegiatan politik lokal dalam hal ini Pemilihan Kepala Desa menuntut partisipasi aktif masyarakat desa yang memenuhi syarat. Perilaku memilih dalam masyarakat, Pilkades merupakan aspek kehidupan masyarakat desa dalam kehidupan politik. Perilaku politik masyarakat merupakan sebuah pengamatan terhadap sikap masyarakat terhadap partisipasi dalam pemilihan Kepala Desa.¹

Pemilihan umum sudah menjadi budaya bagi pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia, setiap 6 tahun sekali semua kepala pemimpin baik dari tingkat presiden, Kepala daerah bahkan sampai kepala desa juga melakukan pergantian dengan mengadakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan di sebut juga sebagai partisipasi politik yang selalu diikuti oleh banyak masyarakat di Pantan Pawoh.

Perilaku memilih masyarakat pada dasarnya terkait dengan budaya politik masyarakat yang ada, karena perilaku memilih merupakan sikap masyarakat terhadap memilih dan menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Pemilihan Kepala Desa (pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaa dimana rakyat

¹ Haryanto, Agung, Rizky. Preferensi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2019.

yang berhak dan terdaftar sebagai pemilih, diberi kebebasan menentukan pilihan secara langsung untuk menentukan pilihannya.

Budaya politik yang dilakukan dalam pemilihan kepala desa selama 6 tahun sekali ini, banyak diikuti oleh masyarakat, Dimana masyarakat sangat antusias dalam mengikuti pemilihan kepala desa, dan mereka selalu memiliki keinginan dalam menentukan pilihan yang menurut mereka adalah pilihan terbaik dan tidak ada paksaan dari orang lain dalam memilih kepala desa, masyarakat sangat aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa oleh sebab itu mereka berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Secara umum partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).² Proses pemilihan ini harus dijauhkan dari berbagai macam kecurangan, karena tidak hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas tetapi lebih besar itu merusak nilai demokrasi. Kepala Desa yang dibutuhkan masyarakat adalah pemimpin yang mempunyai kompetensi yang ditopang moral yang baik dan kemampuan memimpin.

Pemilihan kepala desa yang dilakukan dalam 6 tahun sekali ini di sambut oleh masyarakat sangat antusias, dalam pemilihan kepala desa, dimana harus jauh dari kata kecurangan karena dalam pemilihan kepala desa agar dapat memilih kepala desa yang benar-benar jujur, amanah dan bersih dari korupsi, dan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kompetensi untuk memimpin desa, agar desa kedepannya lebih maju lagi, oleh sebab itu partisipasi pemilih sangat diharapkan hal ini juga telah tertera dalam qanun Aceh.

Sebagaimanana yang diatur pada Qanun Aceh Nomor Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala desa Di Aceh pasal 11 menyatakan (1) Yang berhak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau telah/pernah menikah secara sah. Dengan

²*Ibid* ...hlm, 92.

demikian berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala desa Di Aceh maka anak yang telah berumur di atas 17 tahun, berhak mengeluarkan hak pilihnya sebagai warga untuk memilih kepala desa.

Meningkatkan partisipasi politik pada pemilih milenial di desa Pantan Pawoh merupakan tugas aparatur desa selaku pihak yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan menyukseskan pemilihan kepala desa. Aparatur desa memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula guna menambah dukungan dalam pemilihan kepala desa dan memaksimalkan pemilihan pada pemilih pemula di desa Pantan Pawoh, Kekhawatiran tersebut harus diantisipasi agar tidak ada oknum, pihak, atau kelompok yang memanfaatkan pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Karena banyak masyarakat yang tidak hadir dalam memilih tentunya sangat rugi bagi kepentingan seluruh masyarakat nantinya.

Generasi milenial dalam memilih lebih tertarik pada faktor - faktor pribadi kandidat, penawaran kandidat, dan lingkungan masyarakat dari kandidat. Mereka cenderung diklasifikasikan sebagai pemilih psikologis dan rasional. Jika kandidat ingin memperoleh suara milenial, tim sukses kandidat tersebut perlu menemukan kandidat yang positif dan memberikan visi, misi, dan program kerja mereka dalam kampanye yang menarik. Berdasarkan data ini, tingkat kematangan demokrasi pada generasi milenial relatif rendah. Dibandingkan dengan negara-negara maju dan tingkat demokrasi yang lebih tinggi, maka seharusnya preferensi memilih berdasarkan faktor kinerja yang lebih penting berdasarkan pada faktor identitas kandidat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat desa Pantan Pawoh mengatakan bahwa peranan pemilih milenial juga sangat memegang peranan yang cukup dalam pemilihan kepala desa, banyak pemilih milenial yang ingin memberikan suaranya untuk pemilihan kepala desa. Adapun jumlah pemilih milenial di desa Pantan Pawoh berjumlah 23 orang milenial. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada**

Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana partisipasi pemilih Milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemilih Milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui partisipasi pemilih Milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih Milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentu akan memiliki manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang akan menggunakannya. Oleh karena itu, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis tentang partisipasi pemilih milenial dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan kepada mahasiswa baik yang sedang belajar, maupun dalam mengikuti masa kuliah menyangkut partisipasi pemilih milenial dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022.

3. Manfaat individual

Penelitian ini dilakukan dan disusun oleh Peneliti sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar kesarjanaan Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.5 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibuat penjelsan istilah untuk variabel yang akan diteliti, sehingga siapa saja yang membacanya tidak terjadi kesalah pahaman. Berikut penjelsan istilah dari masing-masing variabel yaitu:

1. Partisipasi

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Supriadi dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.³

Partisipasi dalam penelitian ini adalah partisipasi yang dilakukan oleh pemilih milenial dalam memilih kepala desa, dalam pemilihan tersebut pemilih milenial ikut serta untuk menentukan pilihan yang terbaik menurut persepsi atau pendapatnya bagi pemimpin desa.

³ Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Adicita. 2001). hal. 201-202.

2. Pemilih Milenial

Generasi milenial yang dikenal dengan sebutan generasi Y merupakan generasi yang lahir sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik menyoalkan hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan perilaku politik adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan.⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemilih milenial dalam penelitian ini adalah pemilih di kalangan muda, bahkan ada yang baru pertama sekali memailih kepala desa, dengan tujuan untuk memilih pemimpin yang berkualitas, jujur, amanah dan bersih dari korupsi.

3. Kepala Desa

Menurut Surono Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas kepala desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa.⁵

Kepala desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala desa yang memimpin desa di Pantan Pawoh, kepala desa yang di pilih oleh masyarakat khususnya generasi milenial.

⁴Prihatmoko,J.J.Mendemokratiskan Pemilu. Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 46.

⁵Surono. 2019. "Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Petani Agrowisata "Taruna Tani kampung Flory" di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta". Yogyakarta: APMD, hal. 10.

1.6 Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau telaah pustaka dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman secara utuh, oleh karenanya penulis mencoba melihat beberapa literatur yang relevan dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Agung Haryanto *Preferensi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara dengan delapan narasumber generasi milenial desa Kebumen didapati bahwa kecenderungan preferensi memilih generasi milenial berdasarkan kepada latar belakang lingkungan serta latar belakang karakteristik, sifat, atau perilaku calon kepala desa yang sesuai dengan letak dimana Desa Kebumen tersebut berada yaitu letaknya di Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa dengan ciri khas karakteristik masyarakatnya yang halus. Kesimpulan: pengaruh latar belakang lingkungan sosial Desa Kebumen juga menentukan preferensi memilih bagi generasi milenial. Gaya hidup sederhana serta kepribadian yang baik merupakan aspek yang menentukan preferensi memilih generasi milenial terhadap calon kepala desa.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Dimar Tidi Hamsah *“Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku pemilih milenial di Kecamatan Kecamatan Gatak dikategorikan menjadi tipe pemilih Rasional, Kritis, Tradisional, dan Skeptis. Kedekatan dengan teknologi serta tingginya tingkat pendidikan jika dibandingkan dengan segmen pemilih lain menjadikan milenial memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap program calon legislatif sehingga menjadikan pemilih milenial rasional dalam memberikan suara

⁶ Rizky Agung Haryanto *Preferensi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru*. *Jurnal Program Studi Kebijakan Publik*, 2019.

pada pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.⁷

Penelitian yang dilakukan Lina Marsellina Sijabat dengan judul “Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh sosialisasi berdasarkan kebiasaan, aktivitas sosial, lingkungan sosial, relasi sosial dan media sosial. Dibuktikan dengan persentase yang cukup signifikan yaitu 58% dengan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 250 jiwa dan yang hanya memilih hanya 145 jiwa. Metode sosialisasi yang digunakan melalui kampanye langsung dan media sosial. Dasar pertimbangan pemilih pemula dalam menentukan pilihan berdasarkan sosok caleg disebabkan oleh ideologi, prestasi, track record atau latar belakang caleg, metode sosialisasi. Alasan pemilih lebih memilih sosok calon anggota legislatif daripada partai politik menempatkan rasionalitas pemilih pemula yang lebih melihat pada track record calon pemimpin dan melemahnya kepercayaan terhadap partai politik, dan tidak disepakatinya sistem *money politic*.⁸

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami skripsi ini, penulis lebih dulu akan menguraikan sistematika pembahasan. Skripsi ini dibagi kedalam empat bab, yang masing-masing bab terhubung antara satu dengan yang lainnya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berjudul tinjauan umum pemilih milenial dalam Pemilihan Kepala Desa. Pembahasannya meliputi Konsep partisipasi, konsep politik, partisipasi politik, Partisipasi pemilih milenial, kepala desa.

⁷ Dimar Tidi Hamsah “Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Politik Pemerintahan Prodi Politik Pemerintahan*. 2019.

⁸ Lina Marsellina Sijabat dengan judul “Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintah.

Bab tiga berjudul Partisipasi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa. Pembahasannya meliputi gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian terdiri dari partisipasi pemilih milenial dalam pemilihan kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022 dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022

Bab empat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan dalam penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang ditemukan dalam pembahasan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM PEMILIH MILENIAL DALAM PILIHAN KEPALA DESA

2. 1. Konsep Partisipasi

2.1.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam segala bentuk kegiatan, partisipasi ini biasanya di ikuti untuk mengikuti seluruh kegiatan yang telah ada, dengan keikutsertaan masyarakat tersebut dalam salah satu acara atau kegiatan tersebut, maka acara tersebut menjadi lebih menarik lagi, karena diikuti oleh banyak massa. Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan, Secara etimologi, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata “*part*” yang berarti bagian. Jika kata “*part*” dikembangkan akan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi “*to participate*” yang bermakna turut ambil bagian.⁹

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.¹⁰

Partisipasi yaitu keputusan yang diambil oleh masyarakat dalam bentuk saran atau pendapat masyarakat dalam keikutsertaan masyarakat untuk mengikuti acara-acara atau kegiatan tersebut sehingga acara-acara tersebut lebih meriah lagi dan lebih menarik ulagi untuk diikuti. Serta partisipasi ini juga dapat di katakana sebagai pemecahan masalah dalam suatu problem yang ada di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan adanya partisipasi tersebut semuanya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

⁹ John M. Echols dan Hassan Shadid, *Kamus Inggris Indonesia An EnglishIndonesia Dictionary*. (Jakarta: PT. Gramedia,2002) hal. 10

¹⁰ Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. (Yogyakarta: Adicita. 2001). hal. 201-202.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.¹¹ Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.¹² Keikutsertaan warga negara atau masyarakat dalam suatu kegiatan politik, tidak terlepas dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat, dimana masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan pemimpin pemerintah baik ditingkat pusat sampai pada tingkat daerah.

Jadi dapat disimpulkan partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang telah ada, dengan keikutsertaan masyarakat tersebut maka masalah-masalah yang bisa di selesaikan dengan cepat dan adil, untuk itulah mereka diajak untuk berpartisipasi mengikuti seluruh kegiatan yang ada di masyarakat.

Menurut Saligman Edwin dan Amin.¹³ Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a. Partisipasi Langsung - Partisipasi R yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.¹⁴

¹¹ Sumaryadi, I. Nyoman, *Sosiologi Pemerintahan*. (Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor, 2010). hal. 46

¹² Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung, Aditama, 2005), hal 114.

¹³ Saligman, Edwin, M. Al Amin. *Jurnal Partisipasi Masyarakat* 1-6, 2003 hal. 9.

¹⁴ Sundariningrum. *Klasifikasi Partisipasi*. (Jakarta: Grasindo, 2001) hal. 38.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan pendapat yang di atas maka partisipasi merupakan faktor terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu baik dalam suatu organisasi, yang pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan dicapai oleh organisasinya dan mempunyai tanggung jawab bersama setiap tujuan tersebut.

¹⁵ Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, (Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta, 2011) hal. 61-63

2.1.2 Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Astuti, terbagi atas:

- a. Partisipasi Vertikal Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien. Partisipasi vertical ini biasanya dalam pemilihan kepala desa, atau pemilihan kepala daerah dan kepala Negara, dimana masyarakat berpartisipasi tetapi mereka berada di yang paling bawah
- b. Partisipasi horizontal Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh adalah acara-acara yang dilakukan oleh adat istiadat seperti acara perkawinan, sunatan dan partisipasi guru-guru di sekolah dalam berbagai kegiatan.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Partisipasi fisik Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.
- b. Partisipasi non fisik Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.¹⁶

2.2 Konsep Politik

2.2.1 Pengertian Politik

¹⁶ Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan ...*, hal. 58.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis dan teta arti dari kata polis sendiri yaitu kota/Negara sedangkan untuk kata teta yaitu urusan. Adapun menurut Miriam Budiardjo, pengertian politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Politik merupakan usaha untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai *damonia* atau *the good life*. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl: "Politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*Politics, at its best is a noble quest for a good order and justice*)" betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam pada itu tentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai dan ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan.¹⁷

Menurut Ramlan Surbakti terdapat lima pandangan mengenai arti politik. Pertama, pandangan klasik, Aristoteles melihat politik sebagai suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal-hal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Pada pandangan klasik, dasar moral tertinggi terdapat pada urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan swasta.

Kedua, Pandangan Institusional atau kelembagaan melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Max Weber merumuskan politik sebagai persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan atau persaingan untuk mempengaruhi pembagian kekuasaan antarnegara maupun antar kelompok di dalam suatu negara.

Ketiga, Pandangan kekuasaan melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Pandangan ini biasanya

¹⁷ Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). hal 15

dipersepsikan sebagai sesuatu yang kotor. Hal tersebut karena di dalam mencari dan mempertahankan kekuasaan digunakan juga tindakan yang ilegal dan amoral. Keempat, pandangan fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. David Easton merumuskannya sebagai *the authoritative allocation of values for a society*, atau alokasi nilai-nilai otoritatif, berdasarkan kewenangan, dan karena itu mengikat untuk suatu masyarakat. Easton kemudian menggolongkan perilaku politik berupa kegiatan yang mempengaruhi (mendukung, mengubah, menentang) proses pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sedangkan Harold Laswell memandang proses politik sebagai masalah *who gets what, when, how*, atau masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Mendapat apa artinya mendapat nilai-nilai. Kapan berarti ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Bagaimana berarti dengan cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai. Nilai yang dimaksud adalah hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar oleh manusia dengan derajat kedalaman upaya yang berbeda untuk mencapainya. Secara singkat, nilai-nilai tersebut ada yang bersifat ideal sepiritual maupun material jasmaniah.

Kelima, pandangan konflik memandang politik sebagai upaya untuk mendapatkan dan/atau mempertahankan nilai-nilai. Perebutan dalam upaya mendapatkan dan/mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Maka dari itu politik pada dasarnya adalah konflik. Pandangan ini mendasarkan bahwa konflik adalah gejala yang serba-hadir dan gejala yang melekat dalam setiap proses politik.¹⁸

Menurut Kartini kartono, dilihat dari struktur dan kelembagaan politik dapat diartikan sebagai suatu yang ada relasinya dengan pemerintahan, undangundang, hukum, kebijakan, atau policy, dan lain-lain yakni:

1. Pengaturan dan penguasaan oleh Negara
2. Cara memerintah suatu teritorium tertentu

¹⁸ Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010), hal 1-8

3. Organisasi, pengaturan dan tindakan Negara atau pemerintahan untuk mengendalikan Negara secara konstitusional dan yuridis formal
4. Ilmu pengetahuan tentang kekuasaan.¹⁹

Secara etimologis yaitu kata “politik” ini masih memiliki keterkaitan dengan kata-kata seperti “polisi” dan “kebijakan” melihat kata “kebijakan” tadi maka “politik” berhubungan erat dengan perilaku-perilaku yang terkait dengan suatu pembuatan kebijakan. Sehingga “politisi” adalah orang yang mempelajari, menekuni, mempraktekan perilaku-perilaku didalam politik tersebut.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) menurut Miriam Budiardjo adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik yang materiil maupun yang mental) yang dikejar biasanya langka sifatnya. Di pihak lain, di negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsensus (*consensus*).²⁰

2.2.2 Strategi Politik

Strategi politik era sekarang adalah era yang penuh dengan kompetisi dalam memperebutkan berbagai peluang dan kesempatan dalam hidup sekarang ini, orang-orang semakin yakin bahwa memanfaatkan intuitif atau kenekatan saja merupakan tindakan yang bodoh apabila tidak didukung oleh cara pencapaian yang terencana dan dipertimbangkan secara tepat dan matang dalam menghadapi

¹⁹ Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2012). hal. 12

²⁰ Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008). hal. 15

sebuah ketidakpastian. Cara pencapaian tujuan yang terencana dan melalui pertimbangan yang tepat dan matang tersebutlah dapat dikatakan strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani "*Strategos*" (Sratos: militer dan pemimpin), yang berarti kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan.²¹ Sedangkan menurut Santoso, dalam Kamus Modern Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah proses untuk menentukan keputusan dengan menggunakan berbagai pertimbangan. Konsep strategi yang mulanya digunakan pada saat perang saat ini berkembang hingga ranah politik. Schroder menyatakan bahwa strategi dalam politik diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik seperti pemekaran daerah, pemberlakuan sistem desentralisasi daerah dan termasuk juga strategi politik khusus dalam upaya memenangkan pemilu serta lain sebagainya.²² Berikut adalah strategi yang umum digunakan dalam pemilu dan pilkada langsung, yaitu strategi membangun dukungan atau strategi jaringan, strategi pencitraan politik, dan strategi kampanye politik.

1. Strategi Membangun Dukungan atau Jaringan (Network)

Dalam kaitannya dengan kajian politik, untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis bagaimana kader NW melakukan jaringan dengan elemen masyarakat dalam membentuk relasi politik, penyusun menggunakan teori jaringan. Seperti yang dikatakan oleh para ahli jaringan berupaya membedakan pendekatan mereka dari pendekatan sosiologis yang disebut Ronald Burt "*atomistis*" atau "*normatif*". Sosiologi yang berorientasi otomatis memusatkan perhatian pada aktor yang membuat keputusan dalam keadaan terisolasi dari aktor lain. Lebih umum lagi mereka memusatkan perhatian pada "ciri pribadi" aktor. Menurut para pakar teori jaringan, pendekatan normatif memusatkan perhatian terhadap kultur dan proses sosialisasi yang menanamkan norma dan nilai ke dalam diri aktor. Menurut pendekatan normatif, yang mempersatukan orang secara bersama adalah sekumpulan gagasan bersama. Pakar teori jaringan menolak pandangan demikian dan menyatakan bahwa orang harus memusatkan perhatian

²¹ Schroder, Peter. *Strategi Politik Indonesia*. (Jakarta: Friedrich-Naumann, 2008), hal. 32.

²² *Ibid* ..., h. 35.

pada pola ikatan objektif yang menghubungkan anggota masyarakat. Satu ciri teori jaringan adalah pemusatan perhatiannya pada struktur mikro, artinya bagi teori jaringan, aktor mungkin saja individu, tetapi mungkin juga kelompok, perusahaan dan masyarakat. Prinsip itu adalah sebagai berikut:

1. Ikatan antar aktor biasanya adalah simetris baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang semakin besar atau semakin kecil.
2. Ikatan antara individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas.
3. Terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non acak. Disatu pihak, jaringan adalah transitif bila ada ikatan antara A dan B serta C, maka ada kemungkinan ikatan antara A dan C. akibatnya adalah lebih besar kemungkinan adanya jaringan yang meliputi A,B dan C. Di pihak lain, ada keterbatasan tentang berapa banyak hubungan yang dapat muncul dan berapa kuatnya hubungan itu dapat terjadi. Akibatnya adalah ada kemungkinan terbentuknya kelompok-kelompok jaringan dengan abtas tertentu yang saling terpisah satu sama lainnya.
4. Adanya kelompok jaringan menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun individu.
5. Ada ikatan asimetris antara unsur-unsur di dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusikan secara tidak merata.
6. Distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas menimbulkan kerja sama maupun kompetisi. Beberapa kelompok akan bergabung untuk mendapatkan sumber daya terbatas itu dnegan bekerja sama, sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya.

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pemicu terbentuknya suatu jaringan adalah informasi dan kepentingan. Konteks pilkada, setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari bangunan struktur politik, struktur ekonomi, dan struktur sosialnya. Pada suatu masyarakat yang sangat

kental ikatan primodiana, maka hubungan sosial yang berpegang pada prinsip “patronklien” tidak dapat dielakkan. Pola hubungan tidak hanya terjadi pada struktur formal tetapi terjadi juga pada struktur informal, seperti dalam organisasi organisasi sosial seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan lain sebagainya dibentuk dengan aturan-aturan formal, namun hubungan sosial yang terjalin diantara mereka memiliki celah bagi terbangunnya hubungan patron-klien baik diantara para anggota maupun diantara tingkatan organisasi sosial itu sendiri.

2. Strategi Pencitraan Politik (*Politik Image*)

Karena image dapat dikonstruksikan maka tepat atau tidaknya strategi image politik akan turut ditentukan oleh kondisi dan nilai-nilai yang ada dan tumbuh di masyarakat. Dengan kata lain ketika image politik yang diciptakan ternyata selaras dengan apa yang ada di benak dan pikiran atau imajinasi masyarakat, maka masyarakat itupun akan terkesan dan mempersepsikannya secara positif serta menganggapnya sebagai image politik yang cocok dan baik bagi mereka, dan selain akan mengendap dalam kesadaran kognitif (rasional), mengesankan dalam perasaan (efektif) juga terekam dengan baik dan kuat dalam memori kolektif masyarakat yang sewaktu-waktu akan mudah dibangkitkan. Begitu artinya image positif harus diciptakan maka image politik menjadi sangat vital dalam strategi marketing politik. Karena itu menjadi sangat relevan apabila mengartikan marketing politik sebagai aktivitas menanamkan image politik di benak masyarakat dan menyakinkan public mengenainya.²³

Firmanzah mengingatkan bahwa image merupakan sesuatu yang harus senantiasa dijaga dan diingatkan kualitasnya, dan tidak ada cara yang lebih baik dalam memelihara image selain dengan cara kampanye, kampanye yang terus menerus dan berkesinambungan. Image politik didefinisikan sebagai kontribusi atas representasi dan persepsi masyarakat (publik) akan suatu partai politik atau individu mengenai semua hal yang terkait dengan aktivitas politik. Image politik dapat diciptakan, dibangun dan diperkuat. Image politik dapat melemah, luntur

²³ Firmanzah, *Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h.73.

dan hilang dalam sistem kognitif masyarakat. Image politik memiliki kekuatan untuk memotivasi aktor atau individu untuk melakukan suatu hal. Di samping itu, dapat mempengaruhi pula opini publik sekaligus menyebarkan makna-makna tertentu.²⁴

Satu hal yang harus diperhatikan dalam mendesain image adalah faktor emosional. Image akan lebih baik apabila mampu sejauh mungkin menyentuh aspek emosional pemilih, jadi image tidak boleh hambar apalagi dingin. Menurut Schroder faktor emosional merupakan hal dominan yang menjadi dasar pertimbangan seseorang dalam mengambil keputusan termasuk dalam menentukan pilihan dibandingkan pertimbangan rasional. Agar dapat meraih tingkat keputusan semacam ini dengan lebih mudah, faktor emosional dalam citra yang diinginkan haruslah dapat dirasakan.²⁵

Kedua pengertian diatas menjelaskan bahwa image berkaitan dengan pemahaman atau persepsi seseorang tentang objek berdasarkan informasi yang diterimanya. Sedangkan menurut Ruslan pengertian tentang image pada dasarnya merupakan hal yang abstrak dan tidak bisa diukur secara matematis, tetapi wujudnya bisa dirasakan dan hasil penilaian baik dan buruk yang berasal dari khalayak sasaran khususnya dalam masyarakat secara luas.

Image dapat dikategorikan sebagai strategi positioning suatu partai politik di antara partai politik lainnya. Image biasanya diartikan sebagai cara anggota organisasi dalam melihat kesan dan citra yang berada di benak orang. Positioning merupakan tindakan untuk menancapkan image tertentu kedalam benak para pemilih agar tawaran produk politik dari suatu kontestan memiliki posisi khas, jelas dan penuh arti.

Ketiga, image politik adalah kesan dan persepsi publik terhadap apa saja yang dilakukan partai politik. Dalam hal ini yang paling penting adalah persepsi publik. Partai politik harus mampu menempatkan kesan, citra dan reputasi mereka kedalam benak masyarakat. Hal ini menjadi sulit karena masyarakat memiliki derajat kebebasan (*degree-of-freedom*) yang cukup tinggi untuk mengartikan

²⁴ *Ibid* ..., h. 70.

²⁵ Schroder, Peter. *Strategi Politik*. Indonesia. (Jakarta: Friedrich-Naumann, 2008), h. 43.

semua informasi yang mereka terima. Keempat, image politik terdapat dalam kesadaran publik yang berasal dari memori kolektif masyarakat. Semua yang dilakukan partai politik tidak hilang begitu saja melainkan terekam dalam ingatan publik, masyarakat dan publik adalah entitas yang aktif dan dinamis. Masyarakat adalah entitas yang mampu merasakan, memiliki kebutuhan, bisa berpikir dan memiliki harapan atas semua hal yang ada didalamnya. Penilaian-penilaian yang berlangsung di masyarakat inilah yang dapat memunculkan kesan image politik.²⁶

2.3 Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik Negara. (Suharno, 2004:102-103).

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik. Menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin (2007: 151) adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Miriam Budiarjo, (dalam Cholisin 2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*Public Policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum,

²⁶ Firmanzah, Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas ..., h.75.

menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Dinegara Negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkatan partisipasi warga negara meningkat, modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.²⁷

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang secara atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.²⁸

2.4 Partisipasi Pemilih Milenial

Generasi adalah suatu konstruksi sosial dimana di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang sama. Individu yang menjadi bagian dari satu generasi, adalah mereka yang memiliki kesamaan tahun lahir dalam rentang waktu 20 tahun dan berada dalam dimensi sosial dan dimensi sejarah yang sama. Definisi tersebut secara spesifik juga dikembangkan oleh Ryder (1965) yang mengatakan bahwa generasi adalah

²⁷ Sastroatmodjo, Sudijono. *Partisipasi Politik*. (Semarang : IKIP Semarang Press. 1995) hal. 67

²⁸ Budihardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2008) hal. 367

agregat dari sekelompok individu yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.²⁹

Generasi milenial yang dikenal dengan sebutan generasi Y merupakan generasi yang lahir sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2000. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik menyoalkan hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Sedangkan perilaku politik adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan.³⁰

Pengelompokan generasi milenial didasarkan pada dua hal, yaitu faktor demografi khususnya kesamaan tahun kelahiran dan yang kedua adalah faktor sosiologis khususnya adalah kejadian-kejadian yang historis. Faktor kedua lebih banyak dipakai sebagai dasar dalam studi maupun penelitian tentang perbedaan generasi. Para ahli berpendapat bahwa generasi terbentuk lebih disebabkan karena kejadian atau event yang bersejarah dibandingkan dengan tahun kelahiran.

Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1980-2000. Banyak istilah populer tentang generasi ini; *connected/digital generation* atau *gen why* yang identik dengan karakter berani, inovatif, kreatif, dan modern. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti e-mail, SMS, instant messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming. Ciri-ciri dari generasi Y adalah: karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, pemakaian media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi, lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi,

²⁹ Adnyani dan Putra. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan OCB Terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Komitmen Organisasi*. PT BPR JAYA KERTI. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana. 2016) Bali, hal. 124.

³⁰ Prihatmoko, J.J. *Mendemokratiskan Pemilu. Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 46.

sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya, memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan.³¹

Generasi milenial ialah generasi masa muda yang lahir pada kurun waktu 1980'an hingga tahun 2000. Generasi ini juga disebut sebagai generasi Y, karena kelahiran generasi ini setelah generasi X. Ada pula yang menyebut generasi milenial ialah kelompok demografis yang lahir antara tahun 1980-2000. Segmen karakter ini bisa dibentuk dengan 2 indikator utama, yaitu yang pertama, Creativity Level, yaitu indikator seberapa kuat generasi milenial memiliki ide dan gagasan yang out of the box serta berani mengkomunikasikan gagasan tersebut. Kedua, Connectivity Level, indikator yang menunjukkan seberapa kuat ketergantungan generasi milenial dengan internet dan sosial media. Selain dari sisi online, indikator ini juga mengukur tingkat intensi seorang milenial dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya.³²

Generasi milenial mempunyai harapan yang sangat berbeda tentang permasalahan ekonomi, lingkungan, hingga persoalan sosial politik. Secara merata generasi milenial mempunyai pendidikan yang lebih baik dari para Baby Boomers, mereka cukup terbiasa dengan teknologi bahkan sebagian besar dari mereka sangat ahli dengan teknologi. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, generasi milenial mampu bekerja kreatif dan selalu mempunyai energi positif di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang sosial politik.³³

Kelompok pemilih pemula (*milenial*) ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda, milenial dalam ritual demokrasi (pemilu legislative, pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan

³¹ Aziz, A. L. Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat Di Komunitas Pecintanya: *Prespektif Sosiologi Pengetahuan*. (Living Islam: Volume 1 Nomor 2 , 318-339. 2018). hal, 46.

³² Rojaby, Uky Dzatalini. 2018. *Apatisme Generasi Milenial Terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas Pada Pilgub Jatim 2018)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. hal. 48.

³³ Prasetyanti, Retnayu. *Generasi Millennial Dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok*. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta. Vol. 3 No. 1 (Maret-Agustus 2017), hal. 45.

potensi dan kemampuannya tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula

1. Warga negara Indonesia dan pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah menikah.
2. Baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.
3. Mempunyai hak memilih dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019

Generasi milenial memiliki peluang dan kesempatan berinovasi yang sangat luas. Terciptanya ekosistem digital berhasil menciptakan beraneka ragam bidang usaha tumbuh menjamur di Indonesia. Terbukti dengan semakin menjamurnya perusahaan/usaha online, baik di sektor perdagangan maupun transportasi. Dari sisi pendidikan, generasi milenial juga memiliki kualitas yang lebih unggul. Generasi ini juga mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka menyadari bahwa pendidikan merupakan prioritas yang utama. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia patut optimistis terhadap berbagai potensi yang dimiliki oleh generasi milenial. Pola pikir yang terbuka, bebas, kritis, dan berani adalah suatu modal yang berharga. Ditambah penguasaan dalam bidang teknologi, tentu akan menumbuhkan peluang dan kesempatan berinovasi. Hasil studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group (BCG) bersama University of Berkley tahun 2011 di Amerika Serikat tentang generasi milenial USA menemukan bahwa ciri-ciri generasi milenial yaitu:

1. minat membaca secara konvensional kini sudah menurun karena Generasi Y lebih memilih membaca lewat smartphone mereka;
2. milenial wajib memiliki akun sosial media sebagai alat komunikasi dan pusat informasi;
3. milenial pasti lebih memilih ponsel daripada televisi. Menonton sebuah acara televisi kini sudah tidak lagi menjadi sebuah hiburan karena apapun bisa mereka temukan di telepon genggam;

4. milenial menjadikan keluarga sebagai pusat pertimbangan dan pengambil keputusan mereka.³⁴

Generasi milenial memiliki karakter yang jauh lebih kreatif dan informatif. Generasi tersebut juga memiliki cara pandang yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Lima kota tersebut dipilih karena dinilai menjadi indikator dinamika trend saat ini. Riset tersebut dilakukan dengan cara berhadapan dan mengikuti langsung kegiatan para milenial, serta mewawancarai kelompok-kelompok milenial yang menjadi trendsetter. Generasi ini dilahirkan dan dibesarkan pada saat gejolak ekonomi, politik, dan sosial melanda Indonesia. Deru reformasi mampu memberikan dampak yang mendalam bagi generasi milenial.

Generasi tersebut tumbuh menjadi individu-individu yang open minded, menjunjung tinggi kebebasan, kritis dan berani. Hal tersebut juga didukung dengan kondisi pemerintahan saat ini yang lebih terbuka dan kondusif. Keunggulan dari generasi milenial, yaitu ingin serba cepat, mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, kreatif, dinamis, melek teknologi, dekat dengan media sosial, dan sebagainya (Indah Budiati dkk, 2018: 20).³⁵

2.4.1 Karakteritik Politik Pemilih Milenial

Ciri khas generasi milenial adalah melek informasi dan terkoneksi melalui jejaring media sosial, yang terhubung melalui internet. Media sosial sendiri telah menjadi mesin politik yang efektif bagi kehidupan demokrasi. Arah politik dan pengaruh generasi milenial dalam kehidupan demokrasi dan bagi pengambil kebijakan, setidaknya ditunjukkan dari tiga faktor berikut yaitu: potensi partisipasi politik dan kemandirian pilihan; sensitifitas pada isu sosial dan kebijakan; serta preferensi terhadap kandidat dan pilihan politik.

Pengaruh generasi milenial dalam kehidupan demokrasi di tingkat daerah, nasional dan global akan sangat tergantung dari 3 faktor di atas, dengan asumsi

³⁴Budiati, Indah. *Profil Generasi Milenial Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darmawan, 2018), hal. 15.

³⁵*Ibid*, hal, 20.

bahwa gerakan yang muncul adalah murni karena kesadaran pribadi dan bukan karena dimobilisasi oleh kekuatan politik tertentu pada awalnya.³⁶

Pesta demokrasi 2019 diperkirakan akan didominasi pemilih generasi milenial atau kelompok yang lahir pada 1980-2000. Generasi ini sangat potensial karena memiliki karakteristik tersendiri dan berpengaruh dalam menentukan siapa calon pemimpin bangsa. Ciri pemilih milenial yaitu *Critical* (berpikir kritis), *Change* (senang akan perubahan), *Communicative* (mengkomunikasikan pilihannya dengan pihak lain), serta *Community* (tergabung dalam komunitas) atau disingkat 4C. Sumbangan suara pada Pemilu 2019 diperkirakan mencapai 47 sampai 50%.

Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih milenial akan menentukan siapa calon anggota legislatif dan presiden. Ada kecenderungan bahwa generasi milenial akan menggeser pemilih tradisional yang selama ini dimiliki setiap partai politik. Kondisi itu tentu menjadi tantangan bagi setiap partai politik untuk segera melakukan inovasi demi mendulang suara dari kalangan muda, termasuk masyarakat swing voters yang juga memiliki perilaku milenial.

Preferensi pemilih milenial dalam memutuskan pilihan-pilihan terhadap calon presiden dan wakil presiden yang paling utama adalah kesamaan agama (27 persen), kedua adalah berdasarkan kinerja kandidat (17 persen). Sedangkan 8 faktor lainnya memiliki masing-masing bobot dibawah 10 persen. Secara agregat preferensi pilihan ditentukan faktor rasional (39 persen), faktor psikologis (31 persen) dan faktor sosiologis (30%).

Tujuan dari memilih dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden adalah mendapatkan wakil-wakil rakyat terbaik yang akan memimpin pemerintahan selama 5 tahun mendatang. Tujuan selanjutnya dari demokratisasi adalah bahwa wakil rakyat atau pemimpin terpilih dapat membawa kesejahteraan yang lebih baik melalui mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat.³⁷

³⁶ Budiati, Indah. *Profil Generasi Milenial Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darmawan, 2018), hal. 131

³⁷ Budiati, Indah. *Profil Generasi Milenial Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darmawan, 2018). hal, 128.

Firmanzah menambahkan bahwa dalam diri masing-masing pemilih terdapat dua orientasi sekaligus yaitu; (1) orientasi *'policyproblem solving'*, dan (2) orientasi *'ideologi'*. Ketika pemilih menilai partai politik atau seorang kontestan dari kacamata *'policy-problem solving'*, yang terpenting bagi mereka adalah sejauh mana para kontestan mampu menawarkan program kerja atas solusi bagi suatu permasalahan yang ada. Pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik atau kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional dan kejelasan program kerja. Partai politik atau kontestan yang arah kebijakannya tidak jelas akan cenderung tidak dipilih.³⁸

Sementara pemilih yang lebih mementingkan ikatan *'ideology'* suatu partai atau kontestan, akan lebih menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, agama, moralitas, norma, emosi dan psikografis. Semakin dekat kesamaan partai politik atau calon kontestan, pemilih jenis ini akan cenderung memberikan suaranya kepartai dan kontestan tersebut.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilih

Perilaku politik pemilih ditentukan oleh 7 (tujuh) domain kognitif yang berbeda dan terpisah yaitu:

- 1) Isu dan kebijakan politik (*issue and policies*), merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
- 2) Citra sosial (*social imagery*); menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
- 3) Perasaan emosional (*emotional feeling*); dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh policy politik yang ditawarkan.
- 4) Citra kandidat (*candidate personality*); mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.

³⁸ Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hal. 119.

- 5) Peristiwa mutakhir (*current events*); mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
- 6) Peristiwa pribadi (*personal events*); mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang untuk mempertahankan tanah, dan sebagainya.
- 7) Faktor-faktor epistemik (*epistemic issues*); isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal-hal baru.³⁹

Ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya yaitu sebagai berikut:

- 1) Kondisi awal pemilih, ini dimaksudkan bahwa karakteristik yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mewarisi kemampuan yang berbeda-beda pula. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu ketika mengambil keputusan politik.
- 2) Faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media massa yang memuat data, informasi dan berita berperan penting dalam mempengaruhi opini dimasyarakat.
- 3) Faktor parpol atau kontestan, pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para tokoh-tokoh parpol dengan pandangan mereka masing-masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering melakukan penilaian terhadap figur tokoh parpol, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai parpol yang bersangkutan.

Ada dua faktor utama yang mendorong orang dalam berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, yang mana didalamnya faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya adanya perangsang

³⁹ Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. (Bandung: Alfabeta. 2012), hal. 480.

politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.⁴⁰

Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang untuk tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada di dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah. Pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan.

2.4.3 Partisipasi Politik Pemilih Milenial

Pola pikir kelompok milenial tidak seluruhnya sama. Menurut Milbrath dan Goel dalam Indah Budiati ada tiga tipe pola pikir dalam kelompok ini, yaitu:

1. Tipe apatis, yakni mereka yang alergi terhadap politik, bahkan menarik diri dari proses politik yang ada, sehingga tipe apatis ini tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan politik dan mereka lebih senang menarik diri dari pada mengikuti politik
2. Tipe spektator, yakni mereka yang kurang tertarik dengan politik, tetapi masih kerap menggunakan hak pilihnya; dimana tipe spectactor ini tetap berpartisipasi dalam politik, tetapi mereka tidak terpengaruh keadaan dalam politik tersebut, maksudnya disini siapapun yang menjadi pemimpin mereka akan terima.
3. Tipe gladiator, yakni yang sangat aktif di dalam politik (seperti aktivis partai, pekerja kampanye, dan aktivis organisasi), orang tipe gladiator ini adalah orang-orang yang selalu ikut dalam partisipasi pemilihan kepala desa karena mereka memang menyukai kegiatan-kegiatan perpolitikan apalagi ketika ada pemilihan kepala negara, daerah dan kepala desa.⁴¹

Kelompok usia milenial, ternyata cenderung masuk pada kelompok apatis namun kritis. Mereka lebih suka berpartisipasi dalam bentuk nonkonvensional, karena memaknai partisipasi politik tidak hanya dalam pesta demokrasi,

⁴⁰ Maran, Rafael.. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rieneka Cipta Indonesia, 2001) hal 156.

⁴¹ Budiati, Indah. *Profil Generasi Milenial Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darmawan, 2018) hal. 17.

sebagaimana fenomena yang terjadi dunia, seperti Arab Spring. Menarik bahwa fenomena di Indonesia lebih cenderung menunjukkan bahwa aktivitas generasi milenial yang terkait politik dan isu global belum terlihat naik kepermukaan secara signifikan.

Beberapa isu nasional memang sudah dijadikan topik pembicaraan dan memancing generasi milenial untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, hal ini dapat terlihat dari banyaknya partisipan dari laman www.change.org dimana biasanya khalayak diminta untuk berpartisipasi dalam petisi yang dibuat untuk ikut memengaruhi sebuah keputusan hukum, keputusan politik atau suatu kebijakan. Hal ini menunjukkan terjadinya perkembangan pada generasi milenial dalam upaya mempengaruhi suatu kebijakan atau produk hukum melalui penggunaan media sosial di Indonesia.

Kondisi dimana partisipasi generasi milenial yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat dan keterlibatannya dalam memengaruhi kebijakan pemerintah, dilakukan dengan cara memobilisasi dukungan dan memengaruhi pengambil keputusan-keputusan penting di negeri ini, menunjukkan sikap kritis kelompok milenial dan tidak alergi sepenuhnya terhadap politik. Mereka sejatinya memiliki ketertarikan, tetapi 34 diekspresikan dengan gaya berbeda. Dengan kata lain, pemilih milenial sebenarnya punya potensi besar untuk digeser dari tipe apatis menuju tipe spektator dan bahkan tipe gladiator.

Dengan fenomena global dan nasional tersebut, maka peran generasi milenial dan media sosial sebagai sarana yang digunakan secara langsung akan dapat memengaruhi arah kebijakan pemerintah, memengaruhi respon pemerintah, dan bahkan dapat memacu kinerja pemerintah, yang pada gilirannya akan berimbas pada pilihan politik generasi milenial. Di sisi lain, media sosial juga dapat memicu revolusi politik yang berakibat jauhnya suatu rezim.

2.5 Kepala Desa

2.5.1 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa merupakan seseorang yang memimpin desa, dengan adanya kepemimpinan kepala desa maka desa tersebut dapat menjalankan fungsinya

sebagai pemimpin desa, sehingga dengan adanya kepemimpinan kepala desa maka tugas-tugas desa bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu perlunya kepala desa.

Menurut Surono Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas kepala desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa.⁴²

Kepala desa yang terpilih menjadi pemimpin di desa memiliki wewenang dan tugas dalam menjalankan pemerintahan desa, kepemimpinan yang ada pada kepala desa memberikan peran kepada nya untuk menjadi pemimpin yang adil pemerintahan yang bersih dan memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang di embannya, agar dirinya disukai oleh semua lapisan masyarakat.

Sedangkan menurut Wahyudi dkk kepala desa adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai seseorang yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan maupun kegagalan dalam pemerintahan. Kepala desa mengarahkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program-program serta arapat yang dilakukan oleh kepala desa.⁴³

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan

⁴² Surono. 2019. "Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Petani Agrowisata "Taruna Tani kampung Flory" di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta". Yogyakarta: APMD, hal. 10.

⁴³Wahyudi.2019.Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan, SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business.Vol 2 No 3, hal. 372.

Pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan pemimpin desa yang dipimpin oleh rakyat melalui pemilihan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sehingga kedepannya desa tersebut bisa lebih maju lagi di masa yang akan datang.

2.5.2 Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Seorang kepala desa tentu saja memiliki kewajiban untuk memajukan desa tersebut, karena mereka telah dipilih oleh rakyat dalam memimpin desa. Tugas dan kewajiban kepala desa, dalam memimpin pemerintahan desa, diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, dengan program-program yang ada pada kepala desa. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁴⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. Melaksanakan pembangunan Desa
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa; dan
4. Memberdayakan masyarakat Desa

Dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (m) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 “mengoordinasikan Pembanguna Desa secara partisipatif”, kepala desa memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif demi mewujudkan desa yang sejahtera bagi masyarakatnya.

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kewajiban kepala desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 berkewajiban untuk memegang teguh dan

⁴⁴ Pasal 1 Angka 7 Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2.5.3 Wewenang Kepala Desa

Kepala desa di berikan wewenang dalam memimpin desa, dengan kewenangan yang diberikan kepada desa, maka kepala desa, mampu menjalankan wewenangnya untuk kepentingan masyarakat yang dipimpinnya, dengan adanya wewenang dari kepala desa diharapkan desa menjadi lebih maju di masa yang akan datang dengan kepemimpinannya kepala desatersebut

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 ayat 1 tentang desa kepala desa memiliki wewenang diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerinthan desa, memegang dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan perauratan desa, menetaapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besaryakemakmuran masyarakat

desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) seorang kades wajib menjadi pemimpin yang serbaguan dengan mengatur tentang seluruh tata usaha desa, mulai dari pembangunan desa, asset desa, serta mengatur tentang kemsyarakat baik berupa keamanan ataupun kegiatan yang lain, keaaman diantaranya data berua kegiatan ronda rutin yang dapat menjaga harta benda warga dan menjadikan warga merasa lebih aman dan terjaga dalam malam hari. Kewenangan seorang kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang telah disetujui bersama Badan Perwakilan Desa (BPD)
2. Membuat rencana peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa atas persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Melakukan pembinaan masyarakat
6. Melakukan pembinaan ekonomi didesa.
7. Memudahkan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya apabila masyarakatnya terkena kasus hukum dan wajib menunjuk kuasa hukum untum mendampingi.
9. Melakukan kewenangan lain yang bersifat membangun desa.

2.5.4 Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala desa memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, hal ini tergantung dari kultur dan gaya kepemimpinan kepala desa, perbedaan gaya kepemimpinan kepala desa juga tergantung dari individu-individu yang memimpin desa, sehingga dalam kepemimpinannya kepala desa memiliki ciri khas tertentu dalam memimpin desa

Secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: (i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh Undang-Undang ini.

Dalam Undang-undang yang telah mengatur tugas kepala desa, untuk menjalankan pemerintahan desa dimana secara garis besar yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan desa, memberdayakan masyarakat sehingga terciptanya pembangunan desa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Kepemimpinan kepala desa telah di atur dalam UUD salah satunya yaitu pada pasal 26 ayat (1) dimana tugas kepala desa salah satunya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, dengan adanya tugas kepala desa tersebut, maka diharapkan kepala desa mampu membawa desa tersebut menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi di masa yang akan datang dengan gaya kepemimpinan yang jujur dan adil serta bersih dari korupsi dan kolusi, sehingga desa yang dipimpinnya menjadi lebih maju dan masyarakat lebih sejahtera.

Kepemimpinan seperti dikatakan bahwa merupakan kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain dalam mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga proses mempengaruhi itu harus dimiliki oleh seorang figur kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Karena dalam proses kepemimpinan

tidak terlepas dari gaya kepemimpinan seseorang dalam mempengaruhi kelompok atau orang yang mendapat pengaruh tersebut.⁴⁵

Ada pun beberapa model atau gaya kepemimpinan yang dapat dipakai sebagai bahan pandangan dan mengetahui model, seni atau gaya kepemimpinan seorang kepala desa sebagai berikut:⁴⁶

1. Gaya Demokrasi

Gaya demokrasi dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gaya demokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas dengan bawahan, begitu juga antara bawahan dibagi tugas secara merata dan adil, kemudian pemilihan tugas tersebut dilakukan secara terbuka, antara bawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya, baik bawahan terendah sekali pun boleh menyampaikan saran serta diakui haknya, dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsensus atas kesepakatan bersama;

Gaya kepemimpinan demokrasi yang lebih sederhannya yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dimana dalam gaya kepemimpinan demokrasi ini adanya pembagian tugas dengan bawahannya dalam menjalankan pemerintahan desa, sehingga dalam kepemimpinan demokrasi Radanya I keseimbangan antara atasan dan bawahannya dan tidak adanya kesemene-menaan.

2. Gaya Birokrasi

Gaya birokrasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu, artinya setiap bawahan harus di perlakukan sama disiplinnya, spesialisasi tugas

⁴⁵ Ida Syafriyani, 2016, "Peran Kepala Desa dalam Pembangunan (Studi Akselerasi Percepatan Pembangunan desa)", Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Volume 10 Nomor 2.

⁴⁶ Inu Kencana Syafie, Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hal.7

yang khusus, kerja yang ketat pada aturan (rule), sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana (zakelijk).⁴⁷

Dalam kepemimpinan pemerintahan seperti ini segala sesuatunya dilakukan secara resmi di kantor pada jam dinas tertentu dan dengan tata cara formal, pengaturan dari atas secara sentralistik, serta harus berdasarkan logika bukan perasaan (irrasional), taat dan patuh (*obedience*) kepada aturan (*dicipline*) serta terstruktur dalam kerja; Dalam gaya pemerintahan birokrasi ini tentu salah satu gaya yang dapat ditiru oleh pemimpin, dimana mereka tidak membeda-bedakan bawahannya antara satu individu dengan individu lainnya, selain itu gaya birokrasi ini selalu mengandalkan logika dan perasaan disiplin dan sangat formal serta harus mengikuti segala peraturan yang ada.

3. Gaya Kebebasan dalam Kepemimpinan Pemerintahan

Gaya kebebasan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya, metode ini di kenal juga dengan (*Laissez Faire*) atau (*liberalism*). Dengan begitu dalam gaya ini setiap bawahan bebas bersain dalam berbagai strategis ekonomi, politik, hukum, dan administrasi. Jadi pimpinan pemerintahan memberikan peluang besar pada kegiatan organisasi. Hal ini hanya cocok pada daerah yang sudah modern dengan pola pikir bisa dipertanggung jawabkan, tetapi bila di daerah tradisional akan membuat masyarakat semakin berada di dalam keterbelakangan.⁴⁸

Gaya kebeban seorang pemimpin ini bisa diterapkan pada hal-hal tertentu da nada juga yang tidak bisa diterapkan pada segala aspek karena gaya pemerintahan bebas seperti ini biasanya tidak disiplin dan kurang

⁴⁷ Hermansyah, 2015, "Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung", Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3 Nomor 2.

⁴⁸ Sirajuddin Saleh & Hariati, 2016, "Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros", Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 2.

mengikuti peraturan yang dibuat oleh kantor, sehingga bawahan atau masyarakat bertindak semaunya saja, gaya kepemimpinan kebebasan dalam kepemimpinan pemerintah biasanya kurang maju dalam sebuah lembaga.

4. Gaya Otokratis dalam Kepemimpinan Pemerintahan Gaya otokratis dalam kepemimpinan pemerintahan adalah cara dan irama seseorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode paksaan kekuasaan (*coercive power*). Cara ini cocok untuk mempercepat waktu dikalangan militer, karena itu diterapkan sistem komando dengan *one way traffic* dalam komunikasi pemerintahannya sehingga efektif hasilnya. Tetapi sangat berakibat fatal bagi daerah-daerah yang sudah maju karena ketakutan bawahan hanya ketika pemimpin pemerintahan sedang memiliki kekuasaan saja. Dengan melihat dari gaya kepemimpinan ini dapat dijadikan suatu pandangan seperti telah dikatakan sebelumnya. Dimana seorang pemimpin yaitu kepala desa selaku pemimpin yang memimpin masyarakat desanya, dalam mencapai tujuan pembangunan maka, ia juga harus mampu memainkan peranan serta memiliki model atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi desanya.

Gaya otokratis biasanya gaya yang sangat keras, sehingga gaya otokratis ini banyak tidak disukai oleh masyarakat, karena kebijakan yang diambil sering bertentangan dengan keinginan orang banyak karena gaya kepemimpinan otokratis ini dianggap keras dan lebih mementingkan ego yang memimpin sehingga banyak masyarakat atau bawahannya yang dipimpin kurang senang dengan gaya kepemimpinan otokratis seperti ini dan banyak yang memiliki persepsi negatif terhadap kepemimpinannya. Dan kepemimpinan otokratis sering di katakana pemimpin yang otoriter yang harus mengikuti keinginan mereka sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif.⁴⁹ “penelitian *kualitatif* adalah data yang dikumpulkan bukan berupa dalam bentuk angka”. Jenis penelitian *deskriptif* adalah “pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian *deskriptif* mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena”.⁵⁰

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah termasuk ke dalam jenis data primer. Data primer adalah suatu sumberdata penelitian yang dapat di peroleh secara langsung dari sumber asli, turun kelapangan secara langsung, sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh oleh peneliti dengan secara tidak langsung yang dimana melalui media perantara atau hasil penelitian orang lain.⁵¹

3.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki dan mengenai variable-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya akan dijadikan sasaran penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono bahwa *purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel

⁴⁹ Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Rosdakarya, 2007), hal. 123.

⁵⁰ Nazir, M. *Metode Penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), hal. 43.

⁵¹ Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 57.

dengan pertimbangan tertentu.⁵² Jumlah subjek dalam penelitian ini berjumlah 7 orang milenial.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Tinjauan Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam pembuatan proposal.

2) Pengumpulan data Langsung di Lapangan

Teknik pengumpulan data langsung di lapangan dilakukan dengan cara;

a. Observasi

Observasi merupakan cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data-data penelitian secara langsung mengenai hal-hal yang akan diteliti. Observasi “yaitu Suatu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara peneliti turun langsung kelapangan”.⁵³ Observasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh milenial.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.⁵⁴ Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan

⁵² Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 80.

⁵³ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 78.

⁵⁴ Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* : (Jakarta: Rineka. Cipta, 2004), hal. 39.

dengan cara bertanya atau berkomunikasi secara langsung dengan responden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dari rumusan di atas dapatlah kita tarik garis besar bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data.

Teknik Analisis data yang digunakan adalah *Deskriptif kualitatif* yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.” Menurut Arikunto Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.⁵⁵ Penelitian kualitatif mementingkan proses bukan hasil atau persentase dari data yang diteliti. Untuk mengolah data hasil penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Pengumpulan data (display data)

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti memahami fenomena sosial yang sedang diteliti melalui dokumen-dokumen resmi seperti: monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan

⁵⁵ Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 145.

yang ada setelah mengumpulkan data tersebut kemudian dapat dianalisis. Kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

- (1) Menetapkan fokus penelitian, apakah tetap sebagaimana yang telah direncanakan ataukah perlu diubah.
- (2) Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang telah terkumpul.
- (3) Pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- (4) Penerapan sasaran-sasaran pengumpulan data (informan, situasi, dan dokumen).

b. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari dokumen pribadi. Kegiatan reduksi data berlangsung terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis memo.

Setelah proses pemilihan data dan kemudian diinterhasilkan dengan teliti, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang objektif dari suatu penelitian. Analisis semiotika merupakan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang diperoleh melalui dokumentasi yang dilakukan.

c. Penyajian data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang ketiga dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Verifikasi data

Kegiatan analisis keempat adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang

mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan final akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapang, dokumen pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan. Dengan demikian, data yang terkumpul tersebut dibahas dan diartikan sehingga dapat diberikan gambaran yang tepat mengenai hal-hal yang sebenarnya terjadi dan hal-hal yang seharusnya terjadi.



BAB IV

ANALISIS PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan berada pada koordinat antara 02° 23' 24" - 03° 44' 24" Lintang Utara dan 96° 57' 36" - 97° 56' 24" Bujur Timur dengan ketinggian wilayah rata-rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten Aceh Selatan memiliki luas sebesar 4.173,82 Km² atau 417.382,50 Ha. Kabupaten Aceh Selatan memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues.
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Samudra Hindia.
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten tertua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari 18 kecamatan yang melintang dari selatan hingga utara. Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan terletak di Kecamatan Tapaktuan. Salah satunya adalah Kecamatan Labuhan Haji Barat, di sinilah Desa Panton Pawoh berada. Panton Pawoh merupakan sebuah gampong yang terletak di kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Masyarakat di Gampong Panton Pawoh hidup dengan bekerja sebagai Petani yaitu ke Ladang dan Kesawah dan ada juga yang menjadi PNS dan pedagang.

Masyarakat di Gampong panton Pawoh hidup berdampingan rukun dan termasuk kedalam masyarakat modern, kebanyakan pemuda-pemuda di sana berpendidikan S-1 dan rata-rata rumah tangga juga memiliki kehidupan yang layak, jarang sekali terlihat masyarakat yang sangat miskin, karena semua

masyarakat bekerja, walaupun hanya bertani semuanya bekerja dan memiliki pekerjaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat mengirim anak mereka untuk belajar di universitas.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Partisipasi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022

Pemilih milenial adalah pemilih pemula dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang harus memiliki banyak pengetahuan tentang memilih calon kepala desa karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang pemilihan kepala desa, tetapi pemilih milenial cenderung berfikir lebih kritis, suka akan perubahan suka berdiskusi atau mengkomunikasikan pilihannya dengan pihak lain dan suka tergabung dalam komunitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan YN mengatakan bahwa

Pemilih milenial YN ini baru pertama kali memilih untuk pemilihan kepala desa, dan ini merupakan pengalaman pertama, dalam pemilihan kepala desa di desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, motivasi pemilih milenial untuk memilih kepala desa salah satunya adalah agar terjadi perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang, karena menurut pemilih milenial dengan dirinya menjadi pemilih milenial berharap ada ada perubahan kepemimpinan kepala desa di masa yang akan datang.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemilih milenial memilih kepala desa tujuannya adalah untuk melakukan perubahan, dimana dengan adanya kepala desa yang baru, maka diharapkan dapat menjadikan perubahan pada desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh selatan, selain itu menurut nya calon Kepala Desa yang baru adalah yang lebih cocok untuk memimpin desa.

Pemilih Milenial dalam memilih kepala desa tentu banyak pertimbangan karena sifatnya yang kritis, tentu mereka ingin kepala desa yang memimpin lebih berkualitas dan dapat mensejahterakan masyarakat melalui program dana desa, Selama ini pengelolaan dana desa banyak yang kurang jelas, bahkan dalam

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan YN, Pemilih Milenial Pada Tanggal 27 Oktober 2022

laporannya pun penyalahgunaan dana desa yang berakibat kurangnya pembangunan desa tidak ada tertulis, padahal dana desa cukup banyak tetapi dalam realisasinya dana pembangunan desa kurang merata, apakah memang demikian atau ada unsur-unsur lain yang menjelaskan pembangunan desa memang seperti itu. Berdasarkan hasil wawancara dengan AY mengatakan bahwa

Kita sebagai masyarakat kurang mengerti tentang pengelolaan dana bagaimana, tetapi yang kita dengan jumlah dana desa perdesa itu hampir mencapai 1 Miliar, tetapi masih ada pembangunan desa yang kurang di desa ini, sehingga perlu adanya evaluasi khususnya diri sendiri, apa memang dana desa nya memang sedikit atau ada penyelewengan pengelolaan dana desa yang berdampak kepada pembangunan desa.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang kurang transparan membuat pemilih milenial mengikuti pemilihan kepala desa agar kepala desa yang menurutnya baik, bisa terpilih dan dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat desa itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara dengan SI mengatakan bahwa

Partisipasi dalam memilih kepala desa diantaranya adalah untuk membuat suatu perubahan kearah yang lebih baik, menurut pendapatnya jika pemilihan kepala desa yang beragam orangnya, mungkin desa akan lebih maju, dibandingkan hanya itu-itu saja, apalagi dalam pengelolaan dana desa perlu adanya ke transparanan, sebagai pemilih milenial tentu harus berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, agar desa Pantan Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat ini dapat lebih maju lagi di masa yang akan datang.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa partisipasi pemilih milenial dalam memilih kepala desa diantaranya adalah untuk membuat suatu perubahan kepada desa, agar pembangunan desa Pantan Pawoh kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dapat lebih maju lagi di masa yang akan datang.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan AY, Pemilih Milenial Pada Tanggal 27 Oktober 2022.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan SI, Pemilih Milenial Pada Tanggal 27 Oktober 2022.

Pemilih Milenial memang sedikit lebih kritis dibandingkan orang tua-tua yang ada di Gampong, biasanya orang tua-tua hanya mengikuti sistem yang telah dibuat oleh desa, sedangkan pemilih Milenial mengikuti sistem tetapi juga memiliki pandangan tersendiri bagaimana seharusnya membangun desa yang baik, disinilah terkadang terjadi perdepatan dan argumentasi mengenai pembangunan desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh EG bahwa

Memang perlu dan sangat penting mengikuti pemilihan kepala desa, dan sebagai pemilih Milenial tentu harus kritis dalam menentukan pilihan dalam memilih kepala desa agar kepala desa yang dipilih dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa di masa yang akan datang oleh sebab itu perlu adanya suatu gerakan salah satunya adalah berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa agar desa Pantan Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan ini di masa yang akan datang dapat mensejahterakan masyarakatnya dapat memberdayakan masyarakatnya sehingga tumbuh menjadi lebih maju lagi.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa, pemilih Milenial memiliki keinginan yang kuat untuk membangun desa di masa yang akan datang, pembangunan desa dilakukan agar masyarakat dapat lebih sejahtera, oleh sebab itu perlu adanya suatu gerakan-gerakan agar masyarakat khususnya pemilih Milenial ikut berpartisipasi dalam mengikuti pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala desa yang dilakukan 6 Tahun sekali ini, tentu mendapat sorotan dari masyarakat, bagaimana tidak karena adanya dana desa uang pembangunan untuk desa memiliki angka yang fantastis setiap tahunnya, oleh sebab itu banyak orang yang mengikuti pemilihan kepala desa diantaranya adalah pemilih Milenial yang ingin memilih kepala desa sesuai dengan hati nurani mereka. Seperti yang dikatakan oleh AI bahwa

Pemilihan Kepala desa ini tentu harus diikuti hal ini dilakukan untuk diri kita sendiri, kita pemilih Milenial memilih pemimpin desa yang berkualitas, jujur dan Adil, maka dampaknya akan terjadi pada diri sendiri dan kesejahteraan masyarakat yang lain, oleh sebab itu kita harus mengikuti pemilihan kepala desa demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa sehingga terciptanya desa yang maju dan pembangunan gampong yang

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan EG, Pemilih Milenial Pada Tanggal 28 Oktober 2022

merata di Gampong Pantong Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.⁶⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diuraikan bahwa pemilih Milenial berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dengan tujuan agar adanya pemimpin yang adil, jujur dan berkualitas, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan bagi rakyat itu sendiri di masa yang akan datang dan membuat Gampong Pantong Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan menjadi lebih maju lagi dibandingkan dengan gampong lain di Kecamatan Labuhan Haji Barat.

Partisipasi pemilih Milenial dalam pemilihan kepala desa yang diikuti oleh pemilih Milenial tentu saja memberikan warna baru bagi panggung politik dalam pemilihan kepala desa, karena Pemilih Milenial lebih suka berdiskusi dan mengkomunikasikan pilihannya sehingga banyak terjadi perdebatan-perdebatan dalam pemilihan kepala desa. Hal yang sama juga disampaikan oleh CT yang mengatakan bahwa

Sebagai pemilih Milenial tentu saja kita harus memilih pemimpin yang berkualitas, jujur dan adil, oleh sebab itu sebagai pemilih Milenial harus kritis dan dapat mengkomunikasikan dengan pemilih Milenial lainnya untuk memilih kepala desa yang benar-benar memiliki integritas dalam memilih kepala desa untuk kemajuan desa Pantong Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemilih Milenial harus kebanyakan bersikap lebih kritis dalam memilih kepala desa, jika dibandingkan dengan pemilih yang sudah tua, pemilih milenial memiliki visi dan misi ketika mereka memilih kepala desa untuk menjalankan pemerintahan desa.

Berbeda dengan pemilih yang sudah lanjut usia pemilih Milenial ini memang memiliki suatu *change* (perubahan) dalam membangun desa, apalagi sekarang karena banyaknya dana desa, jadi pengelolaan dana desa harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dana desa tersebut tidak terjadinya penyimpangan

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AI, Pemilih Milenial Pada Tanggal 28 Oktober 2022

apalagi ke transparanan dana desa itu terkadang tidak terpublikasikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan IS mengatakan bahwa

Pemilih milenial berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa ini samata-mata untuk kemajuan desa tersebut, dimana dalam memilih kepala desa tentunya memang harus yang berkualitas dan adil, bukan hanya diterima apa adanya, tetapi sebagai pemilih Milenial harus melihat Visi dan Misi dari pemilih Milenial agar pemerintahan desa dapat lebih maju terutama dalam pembangunan desa di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi dan lebih berkembang, baik dari segi pembangunan desa maupun dari kesejahteraan masyarakat desa.⁶¹

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemilih Milenial dalam mengikuti pemilihan kepala desa memiliki tujuan agar pembangunan desa menjadi lebih maju lagi di masa yang akan datang oleh sebab itu pemilih Milenial berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, untuk kemajuan dan perkembangan desa.

Pemilih Milenial yang berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa lebih kritis dalam menentukan pilihannya karena mereka ingin pemimpin yang benar-benar berkualitas adil dan jujur ditambah lagi pemilih milenial lebih suka perubahan dari pada yang bersifat stagnan atau menetap, oleh sebab itu mereka benar-benar melihat calon yang layak untuk menjadi pemimpin dalam memimpin pemerintahan desa.

Partisipasi pemilih milenial dalam memilih kepala desa untuk mendapatkan pemimpin yang amanat, bersih dan jujur dan berkompeten untuk menjadi kepala desa, partisipasi yang dilakukan oleh para milenial atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain dalam memilih kepala desa, dalam memilih kepala desa pun tidak ada intimidasi dari pihak manapun dalam memilih kepala desa yang ada di desa Pantan Pawoh, ketika para milenial memilih kepala desa murni atas kemauan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk memilih kepala desa, sehingga apa yang mereka lakukan adalah atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan IS, Pemilih Milenial Pada Tanggal 29 Oktober 2022

4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022

Pemilih Milenial dalam memilih kepala desa tentu saja memiliki visi dan misi dalam memilih kepala desa, Pemilih Milenial lebih cenderung kepada perubahan, oleh sebab itu dalam memilih kepala desa mereka lebih senang untuk mengkomunikasikannya dengan pemilih Milenial yang lainnya agar pilihannya juga diterima oleh pemilih Milenial lainnya. Dalam partisipasi pemilih Milenial memilih kepala desa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dari Kepala Desa

Kebijakan dari kepala desa, tentu menjadi faktor yang sangat penting oleh pemilih milenial dalam memilih kepala desa, dengan adanya kebijakan dari calon kepala desa mereka dapat melihat visi dan misi dari kepala desa tersebut, dan dapat mempengaruhi pemilih milenial dalam memilih kepala desa, yang kebijakannya dianggap paling benar dan paling masuk akal, sehingga dia memilihnya untuk menjadi kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan YN mengatakan bahwa

Partisipasi pemilih milenial dalam memilih kepala desa salah satu faktornya tentu melihat kebijakan apa yang diberikan oleh kepala desa ketika telah menjadi kepala desa dan visi dan misinya harus jelas untuk kemajuan desa di masa yang akan datang, oleh sebab itu perlu adanya suatu yang jelas yang disampaikan oleh calon kepala desa, sehingga pemilih milenial yakin dengan kepemimpinan calon kepala desa tersebut dan jangan hanya janji saja serta harus diikuti oleh realisasinya setelah menjabat sebagai kepala desa.⁶²

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemilih milenial dalam berpartisipasi memilih kepala desa melihat kebijakan apa yang disampaikan oleh kepala desa, sehingga pemilih milenial yakin dengan kepemimpinan kepala desa di masa yang akan datang, selain itu visi dan misi juga

⁶² Hasil Wawancara dengan YN, Pemilih Milenial Pada Tanggal 27 Oktober 2022

harus jelas di realisasikan dan bukan hanya janji-jani kampanye agar terpilih menjadi kepala desa.

Kebijakan dari kepala desa pada saat melakukan kampanye sangat penting untuk meyakinkan pemilih milenial agar memilih kepala desa yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang, oleh sebab itu perlu adanya kebijakan yang jelas, jika tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam melaksanakan kampanye tentu saja tidak dapat menarik pemilih milenial, hal yang sama juga disampaikan oleh AY yang mengatakan bahwa

Setiap pemilihan kepala desa tentu kita harus tahu dulu kebijakan atau visi dan misi yang disampaikan oleh masing-masing kandidat kepala desa, agar pemilih milenial tertarik untuk melakukan pemilihan kepala desa, oleh sebab itu perlu adanya kebijakan untuk meyakinkan pemilih milenial untuk memilih kepala desa tersebut, jika tidak dapat meyakinkan pemilih milenial, dengan sendirinya kandidat kepala desa tersebut tidak dapat dipilih.⁶³

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijabarkan bahwa dalam pemilihan kepala desa tentu kandidat kepala desa harus menyampaikan visi dan misinya lebih jelas, agar pemilih pemula tertarik dengan kandidat kepala desa tersebut, jika tidak menyampaikan visi dan misi tentu saja pemilih pemula tidak akan tertarik dengan kandidat tersebut. Oleh sebab itu calon kepala desa harus memiliki pengetahuan yang luas untuk menjadi kepala desa, agar disukai oleh Pemilih Milenial.

Seorang kepala desa ketika menyampaikan pidato kampanye yang mendengar pidato kampanye itu pemilih milenial yang memiliki sifat yang kritis dan mudah untuk diatur oleh sebab itu kepala desa harus mempunyai kebijakan yang jelas dalam memimpin desa agar desa menjadi lebih maju dan masyarakat di desa tersebut menjadi lebih sejahtera lagi di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil wawancara dengan SI mengatakan bahwa

Tentu saja seorang kepala desa harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas mengenai kepemimpinan kepala desa agar pemerintahan desa berjalan dengan baik dan pengelolaan dana desa dapat direalisasikan pada tempatnya yang bermanfaat untuk keperluan

⁶³ Hasil Wawancara dengan AY, Pemilih Milenial Pada Tanggal 27 Oktober 2022

masyarakat, oleh sebab itu dalam pemilihan kepala desa perlu adanya kebijakankebijakan yang jelas, agar kepala desa yang memimpin desa dapat menjadikan desa menjadi lebih maju lagi.⁶⁴

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kepala desa harus memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas, ketika hendak memimpin desa, agar pemerintahan desa kelak yang dipimpinya menjadi lebih maju dan dapat mensejahterakan masyarakat desa melalui alokasi dana desa dan dana desa bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, oleh sebab itu perlu adanya pemimpin desa yang berkualitas.

Seorang pemimpin di desa memang harus memiliki kebijakan dalam memimpin desa, tentu saja kebijakan tersebut tidak menyengsarakan masyarakat. Dan yang lebih penting lagi dalam pengelolaan dana desa yang paling penting adalah ketransparanan dalam mengelola dana desa, Dalam menentukan kebijakan dana desa seorang kepala desa harus adil jangan berat sebelah atau mementingkan saudara, karena seorang pemimpin benar-benar harus adil dalam menggunakan jabatannya untuk menjadi pemimpin.

2. Citra Kandidat Kepala Desa

Citra kepala desa tentu sangat penting dalam memimpin desa, dengan citra yang baik seorang kepala desa tentu disukai oleh pemilih milenial, jika tidak memiliki citra yang baik tentu saja tidak dipilih oleh milenial, citra diri seorang pemimpin sangat perlu untuk memimpin desa, seorang kepala desa yang memiliki citra yang baik tentu saja kemungkin besar diplin menjadi pemimpin. Berdasarkan hasil wawancara dengan EG mengatakan bahwa

Citra kandidat kepala desa memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari apalagi seorang kepala desa sangat peduli terhadap citra dengan adanya citra yang baik, maka akan mudah untuk dipilih oleh Pemilih Milenial dan akan disukai oleh pemilih milenial karena memang memiliki citra yang baik, jika kandidat kepala desa suka main judi dan mabuk-mabukan siapa yang akan memilih pasti orang tidak menyukainya.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan SI, Pemilih Milenial Pada Tanggal 27 Oktober 2022

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan EG, Pemilih Milenial Pada Tanggal 28 Oktober 2022

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa citra kandidat kepala memang sangat penting untuk dipilih, jika citra sangat penting bagi seorang pemimpin, tanpa citra yang baik mustahil seseorang kandidat kepala desa untuk dipilih, menjadi seorang pemimpin citra memang paling pertama dilihat oleh banyak orang. Berdasarkan hasil wawancara dengan CT mengatakan bahwa

Itu benar sekali ..., karena citra memang kandidat seorang pemimpin memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari tanpa citra yang baik mustahil seseorang dapat dipilih atau dicalonkan menjadi seorang kepala desa, sebagai contoh kepala desa yang suka mabuk, mukul istri mana mungkin dipilih sebagai kepala desa, tentu karena citranya yang kurang bagus, jadi tidak bisa dipilih sebagai kepala desa.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa citra memang sangat penting bagi kepala desa, seseorang yang tidak memiliki citra yang baik, mustahil dipilih sebagai kepala desa, yang dipilih menjadi kepala desa tentu saja yang memiliki citra yang baik dan disukai oleh pemilih milenial, misalnya rajin sholat, suka berbuat baik dan suka menolong orang lain.

3. Perasaan Emosional

Perasaan emosional adalah perasaan suka, benji kepada kepala desa yang akan dipilih, ketika kampanye atau menyampaikan visi dan misi pemilih milenial dapat merasakan dampaknya bagi pemilih milenial, jika pemilih milenial tersebut mendengar kampanye dari kepala desa tersebut maka akan ada perasaan Emosional baik suka maupun tidak suka, seperti yang dikatakan oleh CT bahwa

Memang ketika mendengar kampanye seseorang akan ada perasaan dalam diri pemilih milenial baik itu perasaan suka, maupun perasaan tidak suka, hal ini bentuk dari reaksi diri ketika visi dan misi yang disampaikan maka, diri seorang milenial akan mengatakan suka dan senang dengan kandidat kepala desa tersebut, tetapi jika tidak suka maka diri dari kandidat tidak akan senang itu perasaan emosional yang dimiliki oleh pemilih milenial.⁶⁷

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan CT, Pemilih Milenial Pada Tanggal 29 Oktober 2022

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan CT, Pemilih Milenial Pada Tanggal 29 Oktober 2022

Berdasarkan kutipan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perasaan emosional adalah perasaan yang ada dalam diri seseorang ketika seseorang tersebut mendengar visi dan misi dari kandidat kepala desa, ini juga salah satu faktor pemilih milenial untuk memilih calon kepala desa.

4. Faktor Media Sosial

Faktor media massa juga salah satu faktor penting dalam seorang pemilih milenial memilih kepala desa, karena kenapa, hampir setiap hari pemilih milenial memegang handphone, dengan menggunakan handphone dia dapat melihat calon-calon tersebut melalui gadget, Jadi faktor media sosial salah satunya penentu pilihan dari pemilih milenial, seperti yang dikatakan oleh CT bahwa

Faktor gadget merupakan salah satu faktor penting seseorang untuk memilih menjadi kepala desa, karena hampir setiap hari, setiap jam, detik pemilih milenial memegang handphone, dan tidak tahu untuk apa, mereka menyukai gadget karena praktis dan dapat di bawa kemana saja oleh sebab itu mereka lebih suka memilih gadget dari pada media yang lain seperti televisi.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dijelaskan bahwa media sosial menjadi salah satu faktor penentu pemilih milenial memilih menggunakan gadget karena handphone merupakan media yang selalu digunakan oleh pemilih milenial. Hal yang serupa juga disampaikan oleh IS yang mengatakan bahwa

Benar sekali, faktor media sosial ini benar-benar berpengaruh pada saat sekarang ini karena media sosial digunakan oleh pemilih milenial setiap hari, jadi lebih mudah mencari informasi melalui media sosial, dengan menggunakan media sosial orang dengan mudah melihat siapa kepala desa dan apa visi dan misinya.⁶⁸

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa media sosial memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari, pemilih milenial akan lebih cepat mendapatkan informasi melalui media sosial, karena media sosial ini merupakan salah satu faktor penting pemilih milenial untuk memilih kepala desa, karena dengan adanya media sosial penyampaian informasi

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan IS, Pemilih Milenial Pada Tanggal 29 Oktober 2022.

lebih cepat apalagi pemilih milenial lebih suka handphone dari pada televisi, dalam penyampaian informasi media sosial lebih cepat dibandingkan televisi.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Partisipasi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022

Pemilihan kepala desa yang dilakukan 6 tahun sekali, ini merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat yang ingin suatu perubahan diantaranya adalah pemilih pemula, pemilih pemula ini biasa kritis dalam memilih kepala desa, dan sangat senang dengan perubahan, oleh sebab itu pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa dan juga merupakan pengalaman dalam memilih kepala desa.

Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Tengah Kabupaten Aceh selatan mengadakan pemilihan kepala desa, yang dipilih langsung oleh masyarakat, dimana masyarakat bebas untuk memilih kepala desa yang dia sukai sebagai bentuk pesta demokrasi bagi pemilih milenial, dan tidak ada paksaan untuk memilih kepala desa pada satu kandidat, masing-masing memiliki hak untuk memilih pasangan mana yang akan dia pilih dan dia sukai sebagai pemimpin desa

Partisipasi pemilih milenial dalam memilih kepala desa ingin adanya suatu perubahan, karena pemilih milenial sangat menyukai suatu perubahan dalam memimpin desa terutama dalam menggunakan uang desa, selain itu pemilih milenial dalam memilih kepala desa karena dirinya sangat kritis dalam menentukan pilihan agar kedepannya desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Tengah Kabupaten Aceh Selatan bisa lebih maju lagi, kemudian partisipasi pemilih milenial dalam memilih kandidat kepala desa memiliki irama karena mereka lebih suka mengkomunikasikan kandidat yang dia sukai kepada pemilih milenial yang lainnya sehingga sering menimbulkan argumentasi diantara mereka.

Pemilih milenial tentu saja dari kaum muda yang lebih kritis melihat setiap aspek-aspek yang ada dalam diri kepala desa tersebut agar bisa dipilih untuk menjadi kepala desa, Pemilih milenial memilih kepala desa semata-mata untuk

mencari pasangan yang terbaik dalam memimpin desa selain itu mereka sangat dinamis dan sering menciptakan kontroversi pada saat mereka membicarakan kepala desa yang akan dipilih.

Penelitian ini juga di dukung oleh peneliti Rizky Agung Haryanto menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan wawancara dengan delapan narasumber generasi milenial desa Kebumen didapati bahwa kecenderungan preferensi memilih generasi milenial berdasarkan kepada latar belakang lingkungan serta latar belakang karakteristik, sifat, atau perilaku calon kepala desa yang sesuai dengan letak dimana Desa Kebumen tersebut berada yaitu letaknya di Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya bersuku Jawa dengan ciri khas karakteristik masyarakatnya yang halus. Kesimpulan: pengaruh latar belakang lingkungan sosial Desa Kebumen juga menentukan preferensi memilih bagi generasi milenial. Gaya hidup sederhana serta kepribadian yang baik merupakan aspek yang menentukan preferensi memilih generasi milenial terhadap calon kepala desa.⁶⁹

4.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilih Milenial dalam Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan

Partisipasi pemilih milenial dalam memilih kepala desa tentu saja bertujuan untuk membuat desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan menjadi lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera dan diberdayakan dengan program-program desa, Pemilihan kepala desa yang diikuti oleh pemilih milenial tentu saja menjadi warna tersendiri.

Faktor kebijakan kepala desa menjadi faktor utama pemilih milenial memilih kepala desa, dengan adanya kebijakan yang baik dan menguntungkan masyarakat desa tentu saja kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, jika tidak memiliki kebijakan yang baik dan benar tentu saja tidak akan dipilih oleh

⁶⁹ Rizky Agung Haryanto Preferensi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru. *Jurnal Program Studi Kebijakan Publik*, 2019.

milenial, dimana pada saat melakukan kampanye kepala desa, para milenial lebih suka melihat visi dan misinya.

Kemudian faktor yang kedua adalah citra dari kepala desa tersebut, dimana citra sangat diperhitungkan oleh pemilih milenial dalam memilih kepala desa. Kepala desa yang memiliki citra baik maka kemungkinan akan dipilih, sebaliknya jika kandidat kepala desa memiliki citra buruk maka tidak akan dipilih oleh pemilih milenial, disini citra seorang kepala desa sangat penting.

Faktor ketiga adalah faktor emosional dimana dengan emosional disini memegang peranan yang cukup besar bagi pemilih milenial, Para milenial sangat tertarik ketika kandidat kepala desa menyampaikan visi dan misinya disinilah para milenial dapat melihat dan nada perasaan suka dan tidak suka, inilah yang dinamakan perasaan emosional yang ada dalam diri milenial ketika ingin memilih kandidat calon kepala desa.

Faktor yang terakhir adalah faktor media sosial, dimana peranan media sosial dimasa sekarang sangat penting, karena para milenial lebih suka menggunakan handphone darai pada menonton televisi, oleh sebab itu keberadaan media sosial merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari, bahkan media sosial menjadi faktor penting bagi milenial.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih milenial dalam pemilihan kepala desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan adalah faktor kebijakan yang disampaikan oleh kepala desa ketika melakukan kampanye, kedua faktor citra diri, dimana jika kepala desa memiliki citra yang baik tentu saja akan disukai oleh pemilih milenial sebaliknya jika memiliki citra diri yang kurang baik, maka tidak akan disukai oleh milenial, yang ketiga adalah faktor emosional dan yang keempat adalah faktor media sosial, dimana media sosial saat ini perkembangannya sangat pesat dan sangat disukai oleh milenial.

Penelitian yang dilakukan Lina Marsellina Sijabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula dipengaruhi oleh sosialisasi berdasarkan kebiasaan, aktivitas sosial, lingkungan sosial, relasi sosial dan media sosial. Dibuktikan dengan persentase yang cukup signifikan yaitu 58% dengan

Daftar Pemilih Tetap sebanyak 250 jiwa dan yang hanya memilih hanya 145 jiwa. Metode sosialisasi yang digunakan melalui kampanye langsung dan media sosial. Dasar pertimbangan pemilih pemula dalam menentukan pilihan berdasarkan sosok caleg disebabkan oleh ideologi, prestasi, track record atau latar belakang caleg, metode sosialisasi. Alasan pemilih lebih memilih sosok calon anggota legislatif daripada partai politik menempatkan rasionalitas pemilih pemula yang lebih melihat pada track record calon pemimpin dan melemahnya kepercayaan terhadap partai politik, dan tidak disepakatinya sistem *money politic*.⁷⁰



⁷⁰ Lina Marsellina Sijabat dengan judul “Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Pemerintahan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemilih milenial dalam pemilihan Kepala Desa Pantan Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan dimana Partisipasi pemilih milenial dalam memilih kepala desa ingin adanya suatu perubahan, karena pemilih milenial sangat menyukai suatu perubahan dalam memimpin desa terutama dalam menggunakan uang desa, selain itu pemilih milenial dalam memilih kepala desa karena dirinya sangat kritis dalam menentukan pilihan agar kedepannya desa Pantan Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Tengah Kabupaten Aceh Selatan bisa lebih maju lagi, kemudian partisipasi pemilih milenial dalam memilih kandidat kepala desa memiliki irama karena mereka lebih suka mengkomunikasikan kandidat yang dia sukai kepada pemilih.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih milenial dalam pemilihan kepala desa Pantan Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan adalah faktor kebijakan yang disampaikan oleh kepala desa ketika melakukan kampanye, kedua faktor citra diri, dimana jika kepala desa memiliki citra yang baik tentu saja akan disukai oleh pemilih milenial sebaliknya jika memiliki citra diri yang kurang baik, maka tidak akan disukai oleh milenial, yang ketiga adalah faktor emosional dan yang keempat adalah faktor media sosial, dimana media sosial saat ini perkembangannya sangat pesat dan sangat disukai oleh milenial.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemilih milenial untuk selalu kritis dalam memilih kepala desa untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Diharapkan kepada pemilih milenial untuk lebih berhati-hati dalam melihat kebijakan-kebijakan dari kepala desa ketika kampanye karena itu bisa saja sebagai drama politik agar dirinya dipilih menjadi kepala desa.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti judul yang sama mengenai pemilih milenial dalam memilih kepala desa, untuk kemajuan sistem pendidikan di masa yang akan datang khususnya kemajuan pendidikan di UIN Ar-raniry Prodi Ilmu Politik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani dan Putra. *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan OCB Terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Komitmen Organisasi*, PT BPR JAYA KERTI. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana Bali. 2016).
- Arikunto, S. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*. Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta, 2011.
- Aziz, A. L. *Internalisasi Pemikiran KH. Muhammad Sholeh Darat Di Komunitas Pecintanya: Prespektif Sosiologi Pengetahuan*. (Living Islam: Volume 1 Nomor 2, 318-339. 2018). hal, 46.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Budiati, Indah. *Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Darmawan, 2018.
- Dimar Tidi Hamsah. *Perilaku Pemilih Milenial Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Politik Pemerintahan Prodi Politik Pemerintahan, 2019.
- Djalal, Fasli dan Supriadi, Dedi. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita, 2001.
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Firmanzah. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Haryanto, Agung, Rizky. *Preferensi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang*. Jurnal Kebijakan Publik, 2019.
- Hermansyah. *Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung*. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 3 Nomor 2, 2015.

- Ida Syafriyani. *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan (Studi Akselerasi Percepatan Pembangunan Desa)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10 Nomor 2, 2016.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 2013.
- Inu Kencana Syafie. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesia Dictionary*. Jakarta: PT. Gramedia, 2002.
- Lina Marsellina Sijabat. *Pengaruh Kesadaran Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Legislatif Di Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Tahun 2019*. Skripsi. Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Maran, Rafael. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rieneka Cipta Indonesia, 2001.
- Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2007.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Prasetyanti, Retnayu. *Generasi Millennial Dan Inovasi Jejaring Demokrasi Teman Ahok*. Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik. FISIP UTA'45 Jakarta. Vol. 3 No. 1. Maret-Agustus 2017. I R Y
- Prihatmoko, J.J. *Mendemokratiskan Pemilu. Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rizky Agung Haryanto. *Preferensi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru*. Jurnal Program Studi Kebijakan Publik, 2019.
- Rojaby, Uky Dzatalini. *Apatisme Generasi Milenial Terhadap Politik (Studi Kasus Kodok Alas Pada Pilgub Jatim 2018)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Saligman, Edwin, M. Al Amin. *Jurnal Partisipasi Masyarakat*, 1-6, 2003.

- Sastroatmodjo, Sudijono. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Schroder, Peter. *Strategi Politik Indonesia*. Jakarta: Friedrich-Naumann, 2008.
- Sirajuddin Saleh & Hariati. *Peran Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan di Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros*. Ilmu Sosial, Volume 2 Nomor 2, 2016.
- Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumaryadi, I. Nyoman. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sundariningrum. *Klasifikasi Partisipasi*. Jakarta: Grasindo, 2001.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 2010.
- Surono. *Peran Kepala Desa Dalam Mengembangkan Petani Agrowisata "Taruna Tani Kampung Flory" di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: APMD, 2019.
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama, 2005.
- Wahyudi. *Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan*. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*. Vol 2 No3, 2019.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2397/Un.08/FISIP/Kp.07.6/09/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Politik pada tanggal 01 September 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
PERTAMA :
: Menunjuk Saudara :
1. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. : Sebagai pembimbing pertama
2. Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A. : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Nurul Pajri
NIM : 160801094
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Partisipasi Pemilih Milenial Dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Pantan Pawoh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 12 September 2022
An. Rektor
Dekan,


Muji Mulia

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Politik;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
GAMPONG PANTON PAWOH
KEMUKIMAN KUTA TRIENG
KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT
Jln. Pahlawan, Kode Pos 23757

Panton Pawoh, 22 Oktober 2022

Nomor : 481/2013/15/01/2022

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Mahasiswa Penelitian

Kepada Yth ;

Dekan Fakultas Ilmu dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Nomor ; B-2750/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/10/2022 dan Universitas Islam Negeri(UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Perihal Pengantar Penelitian dengan biodata mahasiswa sebagai berikut:

Nama : NURUL PAJRI


NIM : 160801094

Jurusan : Ilmu Politik

Judul : Partisipasi Pemilih Milenial dalam Menentukan Pilihan Pada Pemilihan Kepala Desa Panton Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan 2022

2. Maka dengan ini kami selaku Keuchik Gampong Panton Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan memberikan izin untuk melaksanakan penelitian kegiatan tersebut.
3. Demikian surat ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panton Pawoh, 22 Oktober 2022
Keuchik Gampong Panton Pawoh



SAID ANSAR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

DATA PRIBADI

Nama : Nurul Pajri
Alamat : Pantan Pawoh
Kode Pos : 23711
Nomor Telepon : 082286583969
Email : khairulfajry69@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tanggal Kelahiran : 20 Juni 1996
Status Marital : Belum Kawin
Warga Negara : WNI
Agama : Islam

RIWAYAT PENDIDIKAN

Mis Pantan Pawoh Tahun (2006-2009)
Mtss Pantan Pawoh Tahun (2009-2011)
Sma.Tarbiyah Labuhan Haji Barat Tahun (2012-2015)

Demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya.



(.....NURUL PAJRI.....)

DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN



Foto 1 Wawancara dengan Milenial 1



Foto 1 Wawancara dengan Milenial 2



Foto 1 Wawancara dengan Milenial 3



Foto 1 Wawancara dengan Milenial 4



Foto 1 Wawancara dengan Milenial 5



Foto 1 Wawancara dengan Milenial 6